

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan, dan cara – cara bagi keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak (Presiden RI, 2014).

Program KB merupakan program untuk mempromosikan pengendalian populasi dan inisiatif kesehatan reproduksi, sehingga keterlibatan suami dalam program KB sangat penting. Hal ini merupakan salah satu poin penting dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kesehatan seksual dan reproduksi, serta kesetaraan gender. Peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana merupakan langkah penting untuk mendorong kesetaraan gender karena dapat membantu mengelola pertumbuhan penduduk dan mengatasi masalah kesehatan reproduksi, serta meningkatkan kesehatan perempuan, mengurangi kematian ibu dan anak (Listyawardani, 2019).

Program KB berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kesehatan reproduksi dasar dan kesejahteraan keluarga, serta dapat memungkinkan masyarakat untuk meminimalkan jumlah kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi yang konsisten dan tidak rumit. Selama ini, pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program KB yang bias terhadap perempuan (*gender bias*), keterlibatan pria di tingkat nasional sangat minim.

Kesetaraan gender tertuang dalam poin 5 SDGs yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak reproduksi untuk turut serta dalam program KB. Partisipasi laki-laki juga merupakan salah satu inisiatif untuk mencegah kesakitan dan kematian ibu akibat kehamilan risiko tinggi (Nurlina, 2015).

Berdasarkan data SDKI pada tahun 2017, prevalensi penggunaan alat kontrasepsi atau *contraceptive prevalence rate* (CPR) di Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan pada peningkatan pengguna dari tahun 1991-2017. Kejadian ini berbanding terbalik dengan tingkat fertilitas atau *total fertility rate* (TFR) yang terus mengalami penurunan. Menurunnya tingkat fertilitas di Indonesia merupakan dampak positif yang didapatkan dari penggunaan alat kontrasepsi pada wanita berusia 15-49 tahun. Prevalensi penggunaan alat kontrasepsi yang ditargetkan pada RPJMN tahun 2014 adalah 60,1% sudah terlampaui dengan pencapaian penggunaan alat kontrasepsi sebesar 61%. Namun, tingkat fertilitas masih di bawah target RPJMN (2,36%), sedangkan saat ini masih di angka 2,6% (BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan, 2018).

Berdasarkan data BKKBN dalam Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2014), proporsi penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan jenis kelamin didapatkan perbandingan yang sangat signifikan antara pria dan wanita dengan angka sebesar 93,66% untuk wanita yang menggunakan KB dan 6,34% pada pria yang menggunakan KB. Pada wanita, metode alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah metode suntikan dengan pengguna sebesar 51,6% dari wanita yang menggunakan KB, sedangkan metode yang paling sedikit/jarang digunakan adalah metode operasi wanita (MOW) dengan pengguna sebesar 1,63%. Pada pria, metode yang paling banyak digunakan adalah kondom, dengan pengguna sebesar 96% dari seluruh pria yang menggunakan KB, sedangkan metode yang paling sedikit digunakan pada pria adalah metode operasi pria (MOP) hanya sebesar 4% dari pria yang menggunakan KB.

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 partisipasi KB pria masih rendah, dengan persentase kondom sebesar 2,5 persen dan MOP 0,2 persen. Berdasarkan data Statistik Program Pengawasan dan Akuntabilitas (SKAP) Kependudukan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP),

capaian KB kondom 2019 mencapai 3 persen dan MOP 0,2 persen. Hal ini terjadi karena banyak keluarga yang menganggap KB adalah urusan perempuan, banyak beredar rumor bahwa MOP adalah kebiri, sehingga memengaruhi pandangan di sosial, budaya, dan agama terhadap MOP (Ahmad, 2009).

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tentang jumlah akseptor MOP pada tahun 2019, didapatkan jumlah penduduk yang menggunakan (MOP) sebanyak 110 orang. Ada penurunan akseptor MOP dari tahun 2020 hingga 2021 di DKI Jakarta. Pada tahun 2020 terdapat 49 orang yang menggunakan MOP, sedangkan pada tahun 2021 hanya terdapat 40 orang yang telah menggunakan MOP. Namun, masih belum ada penelitian yang dilakukan mengenai faktor determinan penggunaan MOP. Berdasarkan paparan data yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, peneliti tertarik mengetahui Determinan Penggunaan MOP di DKI Jakarta pada Tahun 2021.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data penggunaan alat kontrasepsi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pada tahun 2018 hingga 2020 tercatat adanya penurunan jumlah penggunaan kontrasepsi, terkhususnya pada akseptor pengguna Metode Operasi Pria (MOP). Menurut data di DKI Jakarta pada tahun 2018 terdapat 274 akseptor baru, namun terjadi penurunan jumlah akseptor pada tahun 2019 dan 2020 (110 dan 49 akseptor baru). Angka tersebut termasuk penurunan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan jumlah akseptor baru pada tahun 2018 dan sangat jauh dari target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Penggunaan alat kontrasepsi seharusnya sudah menjadi tanggung jawab baik bagi istri maupun suami. Di tengah pandemi saat ini penggunaan MOP sangatlah dianjurkan karena dapat meminimalkan penularan virus covid-19 saat datang ke fasilitas kesehatan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi MOP merupakan alat kontrasepsi yang sangat dianjurkan karena memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi sebesar 99,9% dalam mengurangi risiko terjadinya kehamilan saat berhubungan seksual. Namun hingga saat ini, studi yang membahas determinan penggunaan KB Metode Operasi Pria di Wilayah DKI

Jakarta masih belum sehingga sangat diperlukan upaya untuk mengetahui determinan pemilihan penggunaan alat kontrasepsi pada pria di DKI Jakarta.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan penggunaan alat kontrasepsi Metode Operasi Pria pada pria di DKI Jakarta pada tahun 2021.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui gambaran distribusi dan frekuensi penggunaan MOP, usia, tingkat pendidikan, jumlah anak, tingkat pengetahuan, sikap, dorongan kader, pendapatan, dukungan istri pada pria di DKI Jakarta pada tahun 2021.
- b. Mengetahui hubungan usia, tingkat pendidikan, jumlah anak, pengetahuan, sikap, dorongan kader, pendapatan, dan dukungan istri dengan partisipasi pria dalam menggunakan MOP di DKI Jakarta pada tahun 2021.
- c. Mengetahui faktor dominan yang memengaruhi partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi MOP di DKI Jakarta pada tahun 2021.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengetahuan bagi pengembangan ilmu kesehatan khususnya mengenai determinan tingkat partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi MOP.

I.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Responden: Meningkatkan pengetahuan bagi responden mengenai pentingnya dan manfaat penggunaan alat kontrasepsi dan mengubah sudut pandang yang berpendapat bahwa tanggung jawab

menggunakan kontrasepsi hanya ada pada pihak perempuan atau istri saja melalui edukasi setelah dilakukan pengambilan data.

- b. Manfaat bagi Universitas: menjadi tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berguna bagi masyarakat umum terutama dalam bidang kesehatan masyarakat.
- c. Manfaat bagi peneliti: menambah pengalaman penelitian dalam menemukan bukti ilmiah mengenai keterkaitan determinan penggunaan alat kontrasepsi MOP pada pria.
- d. Manfaat bagi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk saran dan masukan informasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan khususnya dalam pelayanan alat kontrasepsi MOP di wilayah DKI Jakarta.

I.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui determinan penggunaan alat kontrasepsi MOP pada pria di DKI Jakarta tahun 2021. Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta pada bulan Desember 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *cross-sectional*. Metode pengambilan data yang digunakan adalah pengambilan data primer dengan cara melakukan wawancara pada pria pengguna MOP dan pria yang tidak menggunakan MOP. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi penggunaan MOP pada pria, analisis bivariat dengan uji *chi-square* untuk mengetahui hubungan penggunaan MOP di DKI Jakarta pada Tahun 2021 dan Uji Regresi Logistik Ganda untuk menganalisis determinan MOP.